

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Titikkata.com
Media Cetak	

Pengamat Minta Pemprov DKI Jakarta Kaji Kembali PMD ke JakPro

Reporter: Fifi | Editor: Tama

Berdasarkan data yang dihimpun TitikKata, PT Jakarta Propertindo (JakPro) tercatat mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) 4 kali dalam kurun waktu 5 tahun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019, 2020, 2022 dan tahun 2023.

Adapun total PMD yang didapatkan JakPro dalam 4 tahun sebanyak Rp9.903.400.000.000 (Rp9,9 Triliun).

Ditemui TitikKata di Jakarta Utara, Senin (8/7/2024), Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto menjelaskan pandangannya.

"Jadi tentang JakPro itu yang saya ikuti dari tahun 2019 itu dia rugi terus, total akumulasinya itu mencapai 708 miliar. Tapi di lain sisi JakPro ini juga mendapatkan PMD yang cukup signifikan. Nah kalau saya melihat dari persoalan ini, sejak PT JakPro diberikan penugasan khusus bangun JIS terus revitalisasi TIM, itu JakPro mulai mengalami kerugian. Sehingga PMD yang diberikan itu tidak ekuvalen atau tidak sebanding dengan keuntungan, harusnya harus ada prospek keuntungan gitu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, JakPro terus mengalami kerugian. Nah yang jadi persoalan, inikan duit rakyat itu harus di kembalikan ke rakyat manfaatnya, sekarang apa manfaatnya dari penyertaan modal daerah 9,9 trilion ke PT JakPro yang hanya menghasilkan rugi," katanya.

Dia kemudian meminta Pemerintah mengkaji kembali soal pemberian PMD ke JakPro.

"Ini sebenarnya harus dikaji. Didalam peraturan presiden itu ada menyebutkan bahwa kalau BUMD itu kan PMD aset yang dipisahkan, jadi itu yang bertanggungjawab adalah gubernur. Nah, kalau gubernur dalam membuat kebijakan itu ada kepentingan, karena JakPro ini kan mendapatkan tugas-tugas ya maka Gubernur itu harus bertanggungjawab atas kerugian itu. Begitu ketentuannya. Nah itu harus didalami oleh DPRD dengan membentuk Pansus, kenapa jadi rugi JakPro ini. Apakah ada salah kebijakan yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya misalnya mantan gubernur Anies Baswedan memberikan penugasan kepada JakPro membangun JIS, padahal sejatinya JIS itu tidak perlu menggunakan duit APBD yang di PMDkan. Karena ketentuan dalam RPJM itu sebenarnya yang melakukan pembangunan adalah dalam tandakutip dinas olahraga melalui kerjasama," pungkasnya.